

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM  
TERHADAP BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA TAHUN 2011-2013

Fajar Pamungkas

(Email: [fad.pamungkas@gmail.com](mailto:fad.pamungkas@gmail.com))

(HP: 085642228643)

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri Surakarta

***Abstract***

*This research aims to analyze the occurrence of flypaper effect on Regional Expenditure District and Cities in Indonesia in 2011-2013. It has been determined that the dependent variable is Belanj Daerah, whereas the independent variables are Local Own-source Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU). This research based on previous research by Afrizawati (2012). The objects of this research are 470 regencies and cities in Indonesia. Purposive sampling method applied on this research. Data used on this research is secondary data. Data sources is from Realized Local Government Budget (Budget Outcomes) District/ Cities in Indonesia 2011-2013. The test results showed that the PAD and DAU when tasted simultaneously has significant effect on regional expenditure. In this case, coefficient of PAD is more dominant than coefficient DAU on Realized local government budget (budget outcomes). It means there is no flypaper effect on Expenditure in the District/City in Indonesia from 2011 until 2013.*

*Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Fund (DAU), Local Own-source Revenue (PAD), Regional Expenditure*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian otonomi daerah dan desentralisasi seringkali dianggap sebagai dua hal yang sulit dibedakan. Vincent Lemius (1986) menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pengertian mengenai otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia berkenaan dengan otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Sedangkan desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik *et al.*, 2002).

Desentralisasi sendiri diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rondinelli dan Cheema (1983) menjelaskan bahwa dari sisi kebijakan dan administrasi, *desentralisasi* dapat diartikan sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal atau organisasi non-pemerintah. Degefa (2003) menambahkan bahwa desentralisasi sesungguhnya memiliki arti perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif dari pemerintah pusat ke unit-unit pemerintah subnasional, sehingga kerangka desentralisasi harus menghubungkan pendanaan lokal dan otoritas fiskal dengan tanggungjawab dan fungsi penyediaan layanan dari pemerintah lokal agar para politisi lokal dapat menanggung biaya keputusan mereka dan menyampaikan janji-janji mereka. Sebagai upaya penyediaan barang publik, kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional. Pemerintah subnasional adalah tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam suatu negara.

Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional diwujudkan dalam bentuk transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi transfer Bagi Hasil, DAU dan DAK dari pemerintah pusat kepada daerah otonom (Boex, 2001). Daerah otonom sendiri menurut UU 32

tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (fiskal.depkeu, 2010).

Rendahnya kemampuan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan masyarakat yang pada gilirannya akan mengundang campur tangan pusat, atau bahkan dapat menyebabkan dialihkannya sebagian fungsi-fungsi pemerintah daerah ke tingkat pemerintahan yang lebih atas (Isdijoso dan Brahmantio, 2002). Hal ini mengharuskan adanya dana hibah (transfer) dari pemerintah pusat. Menurut Hines dan Thaler (1995), jika pemerintah lokal menerima suatu hibah maka akan dipergunakan untuk meningkatkan pengeluarannya tanpa meningkatkan pajak. Melo (2002) menyatakan bahwa suatu kondisi di mana respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer, maka disebut *flypaper effect*.

Roemer dan Silvestre (2000) berpendapat bahwa *flypaper effect* secara umum dapat dipahami sebagai ketidaksepadanan pengaruh pengeluaran publik dari bantuan pemerintah federal dan peningkatan pendapatan dengan jumlah yang sama. Berapapun bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus memberikan pengaruh yang sama besarnya. Sebagai contoh adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan kepada pemerintah daerah, mestinya memberikan pengaruh yang sama besar yaitu sebesar satu rupiah pada peningkatan pendapatan pemerintah atau masyarakat lokal. Mereka juga menyatakan bahwa interpretasi tentang *flypaper effect* ini diturunkan dari masalah “penumpang gratis” (*free-riding*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal. Di sini pemerintah lokal mendapatkan keuntungan dengan terus meningkatkan pengeluaran local mereka apabila pengeluaran ini dibiayai dengan transfer keuangan pemerintah pusat, karena pemerintah lokal tidak akan sama sekali membayar apa-apa (gratis), sebagai *share* dari tingkat nasional.

Dalam kesepakatan yang dihasilkan oleh Panitia Kerja (panja) Transfer ke Daerah yang beranggotakan 42 orang anggota Badan Anggaran DPR RI dan 11 orang perwakilan Pemerintah yang dikoordinatori oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan disepakati transfer ke daerah dalam APBNP 2010 sebesar Rp 344.612,9 Miliar. Ujar Koordinator Panja Tamsil Linrung dalam penyampaian hasil kerja Panja Transfer ke Daerah Sabtu (1/4) di Gedung Nusantara II DPR RI Senayan Jakarta. Dalam pemaparannya, Tamsil Linrung menegaskan bahwa Kebijakan transfer ke daerah dalam Tahun 2010 tetap diarahkan untuk mendukung program atau kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab (Kementrian Keuangan,2010).

Rodden (2002), menyatakan bahwa transfer keuangan pemerintah pusat masih menjadi primadona sumber penerimaan bagi pemerintah daerah ketimbang pajak daerah. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsisten dengan argumen teoritis dalam ilmu ekonomi kesejahteraan dan ekonomi politik positif, yaitu bahwa pengeluaran publik pemerintah lokal bertumbuh lebih cepat melalui *intergovernmental transfer* daripada dengan pajak lokal. Selanjutnya, hasil penelitian Suyanto (2010), menunjukkan bahwa kebijakan dana desentralisasi membuat daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya. Di sisi

lain, kebijakan dana desentralisasi mendorong timbulnya *flypaper effect*, sehingga peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer dari pemerintah pusat telah mendorong peningkatan pengeluaran daerah otonom secara lebih besar dibandingkan peningkatan pada kapasitas fiskal daerah terhadap perubahan pendapatan. Penelitian Zampeli (1986) memberikan bukti senada untuk data pemerintah kota di Amerika Serikat, yakni terjadi *flypaper effect* dalam reaksi belanja terhadap unconditional grants. Karena itu *flypaper effect* dipandang sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga semestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula (Hines & Thaler, 1995).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin melakukan *Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2011-2013*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis adalah: Sejauh mana PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia Apakah terjadi *flypaper effect* pada tahun 2011-2013?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Menganalisis sejauh mana PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja Pemerintah Kota dan Kabupaten di Indonesia tahun 2011-2013 dan apakah terjadinya *flypaper effect*.

## 1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan pada 394 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia dengan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen, serta belanja daerah sebagai variabel dependen dan data yang digunakan dalam penelitian ini hanya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2011-2013.

## 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris mengenai penerapan sistem perimbangan daerah yang tengah berjalan dan dapat dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi lingkungan pendidikan untuk memperoleh gambaran hakikat desentralisasi fiskal dan keterkaitannya dengan penyediaan fasilitas publik daerah serta bermanfaat sebagai khazanah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1 Konsep Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang atau aturan. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu, 1985). Dengan otonomi daerah tersebut, menurut Mariun (1979) bahwa dengan kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif

sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat.

Lemius (1986) berpendapat bahwa otonomi daerah merupakan kebebasan untuk mengambil keputusan politik maupun administrasi, dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Meskipun dalam otonomi daerah ada kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, tetapi dalam kebutuhan daerah senantiasa disesuaikan dengan kepentingan nasional, ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Terlepas dari itu, dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 yang disahkan pada 15 Oktober 2004.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah.
- h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Sebagaimana yang tercantum dalam UU. No.32 tahun 2004 tujuan Otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal itu sejalan dengan pendapat The Liang Gie dalam Abdurrahman (1987) yang mengemukakan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah :

- a. Mengemukakan kesadaran bernegara/berpemerintah yang mendalam kepada rakyat diseluruh tanah air Indonesia.

- b. Melancarkan penyerahan dana dan daya masyarakat di daerah terutama dalam bidang perekonomian.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat otonomi daerah. Sumber keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber non Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dapat dicapai apabila sumber keuangan daerah dapat membiayai aktifitas daerah yang berasal dari PAD (Warner, 2009).

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi telah tercantum dalam UU. No. 33 tahun 2004, antara lain: (i) PAD (*Pendapatan Asli Daerah*); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan.

## 2.2 Belanja Daerah

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Abdul Halim (2002) mengemukakan bahwa belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau depleksi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana. Dalam PSAP-02 paragraf 39 telah dinyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menjadi 3, yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja lain-lain/tak terduga.

## 2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keeluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004)

### 2.3.1 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana datur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu; Hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

## 2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat “*Block Grant*” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (kemenkeu, 2010).

### 2.4.1 Dasar Hukum

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (kemenkeu, 2010).

### 2.4.2 Alokasi DAU

- DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota
- Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
- Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota (kemenkeu, 2010).

### 2.4.3 Tahapan Penghitungan DAU

#### 2.4.3.1 Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia (kemenkeu, 2010).

#### 2.4.3.2 Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini, DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran data yang akan digunakan (kemenkeu, 2010).

#### 2.4.3.3 Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis (kemenkeu, 2010).

#### 2.4.3.4 Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Panitia Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk

konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU (kemenkeu, 2010).

#### 2.4.4 Formulasi DAU

##### 2.4.4.1 Rumus Formula DAU

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah (kemenkeu, 2010).

Rumus formula DAU

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Dimana:

DAU = Dana Alokasi Umum

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

##### 2.4.4.2 Variabel DAU

- Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (kemenkeu, 2010).

#### 2.5 Metode Penghitungan DAU

##### 2.5.1 Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku (kemenkeu, 2010).

##### 2.5.2 Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasar celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF (kemenkeu, 2010). Berikut rumusnya:

##### 2.5.3 Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IPM} + \alpha_4 \text{IKK} + \alpha_5 \text{IPDRB/kap})$$

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW	=	Indeks Luas Wilayah
IPM	=	Indeks Pembangunan Manusia
IKK	=	Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB/kap	=	Indek Produk Domestik Regional Bruto per kapita
$\alpha$	=	Bobot Indeks

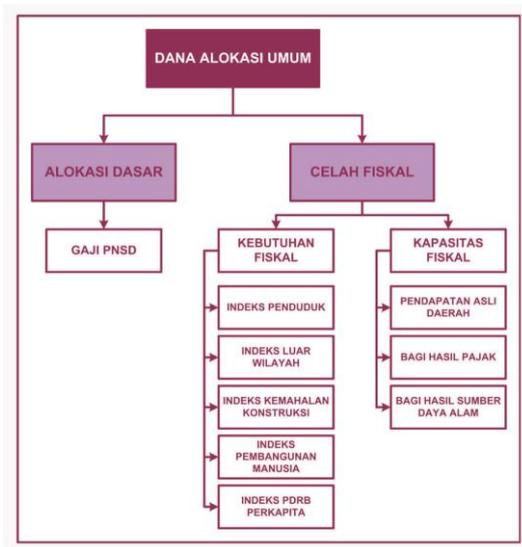
#### 2.5.4 Kapasitas Fiskal (KpF)

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Dimana:

PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DBH Pajak	=	Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak
DBH SDA	=	Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

#### 2.6 Formula DAU



Sumber : Kemenkeu, (2010)

Gambar 2.6 Formula DAU

#### 2.7 Flypaper Effect

*Flypaper effect* secara umum dipahami sebagai ketidaksamaan pengaruh pengeluaran publik dari bantuan pemerintah federal dan peningkatan pendapatan dengan jumlah yang sama. Berapapun bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus memberikan pengaruh yang sama besarnya. Sebagai contoh adalah bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bantuan kepada pemerintah daerah, mestinya memberikan pengaruh yang sama besar yaitu sebesar satu rupiah pada peningkatan pendapatan pemerintah atau masyarakat lokal. Bila hal ini tidak terjadi, di mana ada kecenderungan bahwa pengaruh pengeluaran publik dalam bentuk bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh yang sama besarnya maka hal inilah yang disebut *flypaper effect* (Roemer dan Silvestre, 2000). Lebih lanjut, Oates (1999) mengungkapkan bahwa; “Ketika respon pemerintah daerah lebih besar untuk transfer daripada pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*”.

Fenomena *Flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). *Flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pengeluaran pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *flypaper effect* di Indonesia sebelumnya pernah dilakukan oleh Iskandar (2012) yaitu pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dalam penelitiannya yang berjudul *Flypaper Effect pada Unconditional Grant* diperoleh hasil yang pertama, bahwa *unconditional grants* berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap belanja daerah, PDRB berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja daerah. Kedua, nilai koefisien pendapatan daerah lebih besar dari *unconditional grants* dan keduanya signifikan. Ini menunjukkan tidak terjadinya *flypaper effect* di provinsi Jawa Barat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Maimunah (2006) dengan judul *Flypaper effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan, DAU dan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD. Ini berarti telah terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/ kota di Sumatra.

Kuncoro (2007) meneliti tentang “fenomena *flypaper effect* pada kinerja keuangan pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia”. Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya di Indonesia setidaknya dalam tiga hal. Pertama, studi ini mengklarifikasi keterkaitan langsung antara penerimaan transfer dengan upaya pemerintah daerah dalam menggali PAD. Kedua, dari sisi belanja adalah dengan mengamati sensitivitas belanja pemerintah daerah dalam merespon perolehan transfer. Ketiga, kedua aspek tersebut di atas dirangkum ke dalam satu kerangka kerja dengan memperhatikan eksternalitas fiskal (*budget spillover*), baik sisi penerimaan dan belanja yang muncul secara timbal balik antardaerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa peningkatan alokasi transfer pemerintah pusat dan pertumbuhan belanja pemerintah daerah diikuti dengan penggalan PAD yang lebih tinggi. Gejala ini memperlihatkan bahwa birokrat pemerintah daerah bertindak sangat reaktif terhadap transfer yang diterima dari pusat. Ada indikasi peningkatan belanja yang tinggi tersebut disebabkan karena inefisiensi belanja pemerintah daerah terutama belanja operasional.

Aaberge & Langorgen (1997) menganalisis perilaku fiskal dan Belanja Pemda dengan *simultaneous setting* dan menemukan adanya *flypaper effect* dalam respon daerah terhadap perubahan pendapatan. Penelitian Zampeli (1986) juga memberikan bukti untuk data pemerintah kota di Amerika Serikat, yakni terjadi *flypaper effect* dalam reaksi belanja terhadap *unconditional grants*.

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Di dalam otonomi daerah terdapat kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan daerah, namun apa yang menjadi kebutuhan daerah tersebut senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan nasional sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan pengertian mengenai otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan desentralisasi, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rondinelli dan Cheema (1983) menjelaskan bahwa dari sisi kebijakan dan administrasi, *desentralisasi* dapat diartikan sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan atau otoritas administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal atau organisasi non-pemerintah.

Degefa (2003) menyatakan bahwa desentralisasi sesungguhnya memiliki arti perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif dari pemerintah pusat ke unit-unit pemerintah subnasional, sehingga kerangka desentralisasi harus menghubungkan pendanaan lokal dan otoritas fiskal dengan tanggungjawab dan fungsi penyediaan layanan dari pemerintah lokal agar para politisi lokal dapat menanggung biaya keputusan mereka dan menyampaikan janji-janji mereka. Sebagai upaya penyediaan barang publik, kebijakan desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional. Pemerintah subnasional adalah tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam suatu negara.

Pasalnya, desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan, yang meliputi transfer Bagi Hasil, DAU dan DAK dari pemerintah pusat kepada daerah otonom (Boex, 2001). Menurut Hines dan Thaler (1995), jika pemerintah lokal menerima suatu hibah maka akan dipergunakan untuk meningkatkan pengeluarannya tanpa meningkatkan pajak. Suyanto (2010), menunjukkan bahwa kebijakan dana desentralisasi membuat daerah otonom semakin tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluarannya. Di sisi lain, kebijakan dana desentralisasi mendorong timbulnya *flypaper effect*, sehingga peningkatan dana desentralisasi yang ditransfer dari pemerintah pusat telah mendorong peningkatan pengeluaran daerah otonom secara lebih besar dibandingkan peningkatan pada kapasitas fiskal daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini diteliti hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen, terhadap Belanja Daerah (BD) sebagai variabel dependen.

### 3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 100 kuesioner kepada nasabah bank syariah di wilayah surakarta yang beragama Islam. Penyebaran kuesioner hingga pengembalian dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2014.

### 3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Adapun jumlah kabupaten di Indonesia adalah 414 dan 97 kota yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia (Sumber: BPS).

Melihat kondisi Indonesia selama kurun waktu penelitian (tahun 2011 sampai dengan 2013) mengalami perubahan jumlah daerah akibat penggabungan, penghapusan dan pemekaran daerah baru, maka penulis menggunakan metode *purposive sampling* sebagai tehnik pemilihan sampel dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Ghozali, 2006).

Kriteria tersebut adalah:

1. Daerah kabupaten/kota yang ada dari tahun 2011 sampai dengan 2013.
2. Ketersediaan data laporan realisasi APBD dari tahun 2011 sampai dengan 2013.

Berdasarkan dua kriteria tersebut, terdapat 472 daerah kabupaten/ kota di Indonesia. Namun dalam kurun waktu penelitian tersebut terdapat 2 kabupaten/ kota yang memiliki nilai PAD, DAU dan belanja daerah yang ekstrim dan dapat mengganggu generalisasi hasil penelitian, maka penulis tidak memasukkannya sebagai sampel. Alhasil, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sampel hanya 470 daerah kabupaten/ kota di setiap tahun penelitian.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. sedangkan data dalam penelitian ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 sampai tahun 2013. Data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didapat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui internet.

### 3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresI linier berganda atau multiple regression. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006).

### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk dapat melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut (Priyatno, 2012). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

### 3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistika yang seringkali digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel (Kutner *et al.*, 2004). Jika ingin dikaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi linier berganda (*multiple linear regression model*). Pada penelitian ini dikaji analisis regresi linier berganda atau sering juga disebut dengan regresi klasik (Gujarati, 2003).

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat hubungan PAD dan DAU dalam mempengaruhi belanja daerah. Data diolah dengan bantuan software SPSS seri 19.00. Analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk melihat pengaruh jumlah PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah (BD) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y : Belanja daerah

a : Konstanta

b : koefisien regresi

X1 : DAU

X2 : PAD

e : Error

### 3.6.3 Uji Ketepatan Model (Goodness of Fit Test)

#### 3.6.3.1 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Sebagaimana diketahui bahwa yang mempengaruhi BELANJA DAERAH terdiri dari banyak sekali variabel, misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan variabel-variabel lainnya.

Dalam model di atas, peneliti hanya mengambil dua variabel penjelas yaitu PAD dan DAU.

$$\text{Belanja Daerah} = a + b_1 \text{ PAD} + b_2 \text{ DAU} + e$$

Dimana PAD = Pendapatan Asli Daerah, dan DAU = Dana Alokasi Umum. E = error, yaitu variabel lain yang tidak masuk ke dalam model, tetapi ikut mempengaruhi Belanja Daerah.

Pertanyaannya adalah sejauh mana pengambilan dua variabel itu benar-benar penting? Jika kedua variabel penting, maka keduanya akan mampu menjelaskan variasi Belanja Daerah dengan cukup besar. Ukuran seberapa jauh ketepatan model yang memasukkan PAD dan DAU saja dalam menerangkan Belanja Daerah diuji atau diukur dengan uji F dan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) (Setiaji, 2004).

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### 3.6.3.2 Uji Statistik F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

#### 3.6.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari:

##### 3.6.4.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Jika hasil menunjukkan nilai signifikan diatas

0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

#### 3.6.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor*(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0.10 atau sama dengan nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2006).

#### 3.6.4.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan menjadi tidak layak untuk dipakai (Santoso, 2000) Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

#### 3.6.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Deteksi gejala heteroskedastisitas digunakan uji Park, yaitu dengan menguji tingkat signifikansi. Pengujian ini dilakukan dengan merespon variabel (x) sebagai variabel independen dengan nilai absolut unstandardized residual regresi sebagai variabel dependen. Apabila hasil uji di atas level signifikan ( $p > 0,05$ ), berarti tidak terdapat heterokedastisitas, apabila dibawah level signifikan ( $p < 0,05$ ) maka terdapat heterokedastisitas.

### 3.6.4.5 Uji Hipotesis

#### 3.6.4.5.1 Uji Simultan

Untuk menguji hipotesa pertama, dilakukan uji F dengan membandingkan P Value f hitung yang dihasilkan dari model regresi dengan derajat signifikansinya ( $\alpha$ ) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa di atas adalah jika P Value f hitung  $< \alpha$  ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $H_0$  ditolak. Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

#### 3.6.4.5.2 Uji Parsial

Pengujian secara Parsial adalah uji di dalam regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui variabel independen (DAU dan PAD) yang secara parsial benar-benar menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Belanja daerah). Nilai alpha yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebesar 5 % (0,05).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Data Statistik

Hasil statistik deskriptif untuk variabel variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel dependen yaitu Belanja Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2013 disajikan pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Indonesia 2011-2013

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BELANJA DAERAH	1410	44335	4942250	661687.68	507621.273
PAD	1410	348	2476160	74025.81	165008.731
DAU	1410	174	1672610	416919.92	204309.374
Valid N (listwise)	1410				

Sumber: Hasil Penelitian (Data diolah)

Tabel 4.1 Deskripsi Statistik

Berdasarkan hasil analisis dengan spss 19, dengan 1410 observasi dan 470 *cross sections* (470) daerah kabupaten dan kota (pada masing-masing tahun), maka dapat diketahui deskripsi data statistik pemerintah daerah. Dalam kurun waktu 2011-2013 total belanja daerah tertinggi adalah Rp 4.942.250 di Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012. Adapun dari sejumlah

itu: diketahui bahwa nilai PAD sebesar Rp 273.181.000 dan untuk Dana Alokasi Umum atau DAU sebesar Rp 59.092.000.

#### 4.2 Uji Ketepatan Model (*Goodness Of Fit Test*)

##### 4.2.1. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Hasil analisis R squares sebagai berikut:

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 <sup>a</sup>	.649	.648	301036.030	.976

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Tabel 4.2.1 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R<sup>2</sup> (R Square) sebesar 0.649 atau (64,9%). Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (PAD dan DAU) terhadap variabel dependen (belanja daerah) sebesar 64,9%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (PAD, DAU) mampu menjelaskan sebesar 64.9% variasi variabel dependen, belanja daerah. Sedangkan sisanya sebesar 35.1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

##### 4.2.2 Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.356E14	2	1.178E14	1299.697	.000 <sup>a</sup>
Residual	1.275E14	1407	9.062E10		
Total	3.631E14	1409			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

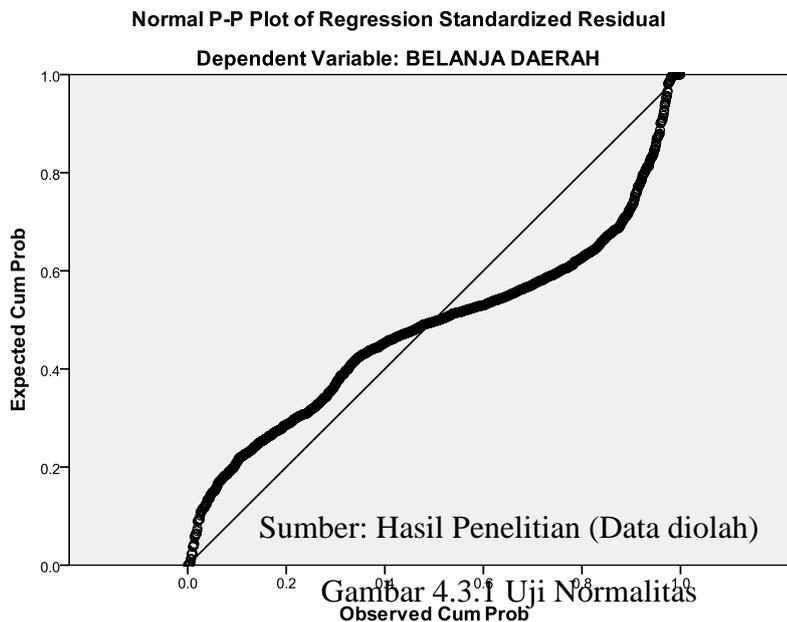
Tabel 4.2.2 Uji Statistik F

Dari hasil analisis pengujian diperoleh  $F = 1299.697$ , dengan demikian nilai  $F$  hitung  $> 4$ , maka model dan pemilihan variabel PAD dan DAU dalam penelitian ini sudah tepat.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas model regresi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil regresi yang baik seharusnya memiliki distribusi regresi residual normal atau mendekati normal. Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Priyatno, 2012).



Pada output di atas dapat diketahui bahwa data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadi multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan bahwa jika Tolerance lebih dari dari 0.1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Priyatno, 2012).

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	21720.339	18585.724		1.169	.243		
PAD	1.323	.054	.430	24.682	.000	.822	1.217
DAU	1.300	.043	.523	30.024	.000	.822	1.217

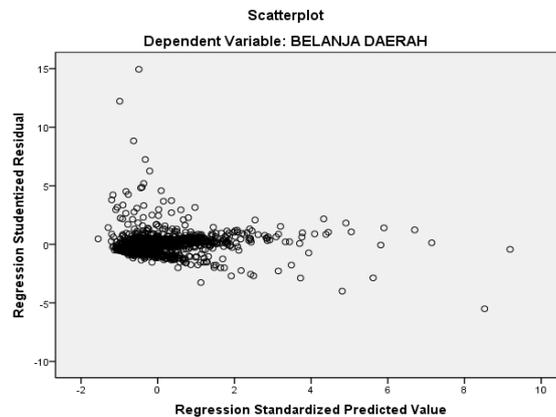
(Sumber: Data diolah)

Tabel 4.3.2 Uji Multikolinearitas

Dari tabel *coefficient* di atas diketahui bahwa nilai Tolerance adalah 8.22 untuk variabel independen dan memiliki nilai VIF sebesar 1.217 untuk kedua variabel independen. Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan bahwa tolerance lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dalam residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya Heteroskedastisitas. Metode pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas dengan melihat scatterplott yaitu jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.



Sumber: Hasil Penelitian (Data diolah)

Gambar 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Dari data di atas diketahui bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pola yang tidak jelas/tidak teratur dan titik-titik menyebar di atas serta di bawah angka nol.

#### 4.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi.

antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi (Priyatno, 2012). Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Metode yang sering digunakan dalam pengujian autokorelasi adalah Uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan (Duwi Priyatno, 2012):

1. Jika  $d$  lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$  maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi;
2. Jika  $d$  terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi;
3. Jika terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau diantara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nilai  $dU$  dan  $dL$  dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson yang ditentukan oleh banyaknya observasi dan banyaknya variabel.

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.805 <sup>a</sup>	.649	.648	301036.030	.976

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Pengolahan Data

Tabel 4.3.4 Uji Autokorelasi

Dari hasil uji autokorelasi diketahui bahwa  $n=470$ ,  $k=3$ , dan nilai DW adalah 0.976. Jika nilai DW lebih dari -2 hingga kurang dari +2 ( $-2 < DW \text{ hitung} < +2$ ) adalah bebas dari autokorelasi. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.4 Uji Hipotesis

##### 4.4.1 Uji Simultan

Pengujian pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan asli Daerah terhadap Belanja Daerah dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap Belanja Daerah dan mana yang lebih dominan. Penghitungan regresi dilakukan dengan menggunakan metode *enter*, yaitu pengujian variabel pertama dilaksanakan secara bersama-sama atau simultan. Nilai alpha dalam pengujian ini adalah lima persen (0,05). Dari hasil analisis uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

#### Pengujian Simultan Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.356E14	2	1.178E14	1299.697	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.275E14	1407	9.062E10		
	Total	3.631E14	1409			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber : Hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 19  
Tabel 4.4.1 Uji Simultan

Diketahui bahwa nilai F hitung dari kedua variabel independen secara bersama-sama/simultan adalah 1299.697 dengan nilai signifikan sebesar 0.000. Maka signifikansi F hitung lebih kecil dari 0.05 yakni 0.000, sehingga Ho yang menyatakan PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah diterima.

#### 4.4.2 Uji Parsial

Pengujian secara Parsial adalah uji di dalam regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui variabel independen (DAU dan PAD) yang secara parsial benar-benar menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Belanja daerah). Nilai alpha yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebesar 5 % (0,05). Dari hasil analisis uji t diperoleh hasil sebagai berikut:

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21720.339	18585.724		1.169	.243
	PAD	1.323	.054	.430	24.682	.000
	DAU	1.300	.043	.523	30.024	.000

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH

Sumber: Hasil Penelitian (Data diolah)

Tabel 4.4.2 Uji Parsial

Hasil uji *t-statistic* menunjukkan nilai *t tolerance* PAD sebesar 24.682 dan DAU sebesar 30.024 dengan demikian dapat dinyatakan bahwa signifikansi pengaruh DAU lebih kuat daripada pengaruh PAD. Sedangkan untuk melihat terjadi atau tidak *flypaper effect*, maka yang di lihat adalah koefisien dari beta DAU dan beta PAD (Afrizawati, 2012).

Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:

$$\text{Belanja Daerah} = 21720.339 + 1.323X_1 + 1.300X_2 + e$$

$$(1.169) \quad (24.682)^* \quad (30.024)**$$

Persamaan tersebut dapat diartikan:

1. Parameter Estimate. Jika nilai PAD meningkat sebesar satu rupiah maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Daerah sebesar 1.323 rupiah.

Begitu juga dengan nilai variabel DAU meningkat sebesar satu rupiah maka akan mengakibatkan naiknya nilai belanja daerah sebesar 1.300 rupiah. Nilai konstanta sebesar 21720.339 menunjukkan nilai rata-rata Y apabila X1 dan X2 nol.

$t_1 = 24.682$  Nilai  $t_1 > 2$ , dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel PAD ada/nyata/bukan nol.  $t_2 = 30.024$  Nilai  $t_2 > 2$ , maka pengaruh variabel DAU ada/nyata/bukan nol.

2. Hasil model di atas juga memiliki arti bahwa DAU dan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah, namun dalam hal ini PAD cenderung lebih dominan dalam membiayai belanja daerah, hal ini dapat dilihat dari koefisien beta DAU sebesar 1.300 lebih kecil dibandingkan dengan beta PAD sebesar 1.323.
3. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh yang positif (diterima), sehingga  $H_1$  yang menyatakan bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui terjadi atau tidaknya *Flypaper Effect* ditolak, karena hasil penelitian ini membuktikan bahwa tidak terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/kota di Indonesia.

## 5. KESIMPULAN

Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepedamasyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. desentralisasi sesungguhnya memiliki arti perpindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif dari pemerintah pusat ke unit-unit pemerintah subnasional, sehingga kerangka desentralisasi harus menghubungkan pendanaan lokal dan otoritas fiskal dengan tanggungjawab dan fungsi penyediaan layanan dari pemerintah lokal agar para politisi lokal dapat menanggung biaya keputusan mereka dan menyampaikan janji-janji mereka. Desentralisasi fiskal dapat dipandang sebagai transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional. Pemerintah subnasional adalah tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam suatu negara.

Transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diwujudkan dalam berbagai bentuk. Diantaranya adalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian transfer bertujuan untuk meningkatkan belanja daerah guna menggali sumber-sumber pembiayaan daerah terutama fiskal daerah. Namun apabila dana transfer dijadikan sebagai primadona sumber penerimaan utama APBD, sehingga berdampak pada kontribusi PAD sebagai sumber penerimaan daerah menjadi relatif kecil. Ketidak sepadanan respon pemerintah terhadap dana transfer dengan respon terhadap pendapatan daerah dalam pembiayaan belanja daerah disebut dengan istilah *flypaper effect*.

Dalam penelitian ini, dengan sampel 470 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah di 470 Kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini terlihat bahwa kebijakan belanja daerah sebagian besar dipengaruhi oleh besarnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, yakni sebesar 64,9%, sedangkan 35,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Dimana semakin besar pendapatan yang diterima

oleh Kabupaten/kota maka Belanja Daerah akan semakin besar. Ditemukan juga bahwa pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah lebih kecil dibandingkan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, hal ini ditunjukkan dengan besarnya koefisien beta PAD adalah 1.323 rupiah dan DAU 1.300 rupiah. Hasil tersebut sekaligus menunjukkan tidak terjadinya *flypaper effect* pada 470 Kabupaten/kota di Indonesia dalam kurun waktu 2011-2013.

Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa Kabupaten/Kota di Indonesia sebagian besar telah mengalami kemajuan dalam mengoptimalkan sumber kekayaan alam guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki tingkat kemandirian yang lebih tinggi dengan ditunjukkannya nilai PAD lebih besar pengaruhnya terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah, sehingga tidak terjadi *flypaper effect*.

Penulis menyadari kelemahan dan keterbatasan dalam penelitian ini, dimana variabel yang digunakan hanya belanja daerah, PAD dan DAU tanpa menyertakan variabel-variabel pembentukan lain dalam model seperti Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal dan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, dll. Saran yang dapat disampaikan adalah agar penelitian selanjutnya memasukkan variabel-variabel penting lainnya agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Sampel penelitian ini juga terbatas pada 470 Kabupaten/kota di Indonesia, maka peneliti selanjutnya diharapkan mampu menyertakan seluruh Kabupaten/kota yang ada di Indonesia agar dapat menemukan lebih banyak temuan-temuan analisis yang lebih bervariasi. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan hanya dalam kurun waktu tiga tahun, sehingga belum dilakukan analisa dan perbandingan komprehensif dan akurat terkait dengan DAU, PAD dan belanja daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan jangka waktu yang lebih lama agar menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat.

## 6. REFERENSI

....., UU. No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.

....., UU No. 33. Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

..... (2010). "Leaflet Dana Alokasi Umum". Available from: [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Leaflet Dana Alokasi Umum.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Leaflet_Dana_Alokasi_Umum.pdf). (Accessed August 10, 2010)

..... (2010). *Kajian Kinerja Fiskal Daerah Otonom Baru (DOB)*. Available from: <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view-mobile.asp?id=20140328143552684736385>. (Accessed Maret 28, 2014)

..... (2010). *Rp 344.612,9 Miliar Untuk Transfer ke Daerah*. Available From: <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/15049>. (Accessed May 2, 2010)

..... (2011). *Data Realisasi APBD TA 2011, Kabupaten Dan Kota Di Indonesia*. Available from: [www.djpk.kemenkeu.go.id/images/konten/data\\_dkd/setelah\\_2006/2011.htm](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/images/konten/data_dkd/setelah_2006/2011.htm). (Accessed November 26, 2012)

..... (2012). *Data Realisasi APBD TA 2012, Kabupaten Dan Kota Di Indonesia*. Available from: [www.djpk.kemenkeu.go.id/images/konten/data\\_dkd/setelah\\_2006/2012.htm](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/images/konten/data_dkd/setelah_2006/2012.htm). (Accessed November 26, 2012)

..... (2013). *Data Realisasi APBD TA 2011, Kabupaten Dan Kota Di Indonesia*. Available from: [www.djpk.kemenkeu.go.id/images/konten/data\\_dkd/setelah\\_2006/2013.htm](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/images/konten/data_dkd/setelah_2006/2013.htm). (Accessed November 26, 2012)

Afriza. (2012). *Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Vol. 2. No. 1, Januari 2014.

Anis, Chariri & Imam Gozhali, (2003). *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.

Boex, Jameson. 2001. *An introductory Overview of Integovernmental Fiscal Relation*. Fiscal Policy Training Program 2001 and Fiscal Decentrization Course. Atlanta: George Satate University. Georgia.

Cheema, G. Shabir and Dennis A. Rondinelli. (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi, Sage Publications.

Dennis, A. Rondinelli. (1999). *What is Decentralization?*. in World Bank, *Decentralization Briefing Notes*. Washington, D.C: WBI Working Papers D.C. 20433, U.S.A

Fafah. (2010). *Penyajian dan Pengungkapan Belanja Daerah*. *Buletin Teknis* No. 04, Nagara Dana Rakca.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Undip

Gramlich, E.M. (1977). *Intergovernmental Grants: A Review of the Empirical Literature*, dalam W.E. Oates, (Ed.), *The Political Economy of Fiscal Federalism*. Lexington Books, Lexington MA: 219-40.

Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, Edisi pertama.

H, Abdurrahman. (1978). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.

Hines dan Thaler. (1995). *Anomalies: The Flypaper Effect*, *The Journal of Economic Perspetive*, Vol. 9. No. 4 (Autumn, 1995), 217-226.

Isdijoso dan Wibowo. (2002). *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan d Kota Surakarta)*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol. 6. 1, 2002.

Iskandar, Irham (2012). *Flypaper Effect Pada Unconditional Grant*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 13, Nomor 1, Juni 2012, hlm.113-131.

Kaho, Josef Riwu. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta : Fak. Sospol–UGM Press.

Kuncoro, Haryo. (2004). *Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9. Aspp-08

Kusumadewi & Rahman. (2007). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*. JAAI, VOLUME 11 NO. 1, Juni 2007: 67–80.

Lewis, Blane D. (2003). Some Empirical Evidence on New Regional Taxes and Charges in Indonesia. *Research Triangle Institute*, North Carolina, USA.

Maimunah, Mutiara. (2006). *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota di Pulau Sumatra*. Simposium Nasional Akuntansi, Padang 23-26 Agustus 2006.

Mardiasmo, (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo, (2002). *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Artikel - Th. I - No. 4 - Juni 2002.

Mello Jr., L.R.D. dan M. Barenstrein, (2001). *Fiscal Decentralization and Governance: A Cross-Country Analysis*. IMF, Washington, DC.

Melo, Ligia. (2002). The Flypaper Effect under Different Institutional Context: The Colombian Case. *Public Choice* 111, 3-4, (April 1): 313 345. <http://www.proquest.com/> (Accessed May 17, 2010). Machfud Sidik dkk. (2002). *DAU, Konsep, Hambatan, dan Prospek di era Otoda*. Jakarta: Buku Kompas.

Oates, Wallace. (1999). "An Essay of Fiscal Federalism". *Journal of Economics Literature*, 37:1120-1149.

Oates, W.E., (1999). "An Essay on Fiscal Federalism". *Journal of Economic Literature*, 37(3), September: 1120-49.

Prakosa, Kesit Bambang. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*. Vol 8 No. 2, 2004.

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 2005, *Strengthening Core Local Government Competencies*. Modul Pelatihan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 2005 tentang *Laporan Realisasi Anggaran*.

PP No. 55 Tahun 2005. *Tentang Dana Perimbangan*.

Rodden, J. (2002). The dilemma of fiscal federalism: Grants And Fiscal Performance Around The World. *American Journal of Political Science*, 46 (3): 670-687.

Rondinelli, Nellis, John R., Cheema, G. Shabbir. (1983). *Decentralization in Developing Countries A Review of Recent Experience*. World Bank staff working papers ; no. 581. Management and development subseries ; no. 8

Rokhaniyah, Siti & Nugroho, Muh. Rudi. (2011). Analisis Flypaper Efeect Pada Belanja Pemerintah Kota Dan Kabupaten. *Jurnal Fokus Ekonomi*, Vol 10, No 2 (2011): Vol. 10 No. 2. [http://: http://portalgaruda.org/](http://portalgaruda.org/) (Accessed February 21 ,2012)

Sekaran, Uma. (1992). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. New York: 2<sup>nd</sup> Edition, John Willey & Sons. <http://www.amazon.com/> (accessed April, 8 2013).

Setiaji, Bambang. (2004). *"Panduan Riset Dengan Pendekatan Kuantitatif."* Surakarta: Press Universitas Muhammadiyah.

Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan dan prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Suryaningrat, Bayu. (1985). *Ihwal Public Administration*. Bandung : tanpa penerbit.

Suyanto. (2010). Flypaper Effect Theory Dalam Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 11*, Nomor 1, Juni 2010, hlm.69-92.

Turnbull, G.K. (1998). *The Overspending and Flypaper Effect of Fiscal Illusion: theory and Empirical Evidence*. *Journal of Urban Economics*, 44(1), Juli: 1-26.

Warner, M..(2009). Civic government or market-based governance?The limits of privatization for rural local governments. *Agriculture and Human Values* 26, no. 1-2, (March 1): 133-143.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Zampelli, Ernest M. 1986. Resource fungibility, the flypaper effect, and the expenditure impact of grants-in-aid. *The Review of Economics and Statistics* 67: 33-40.